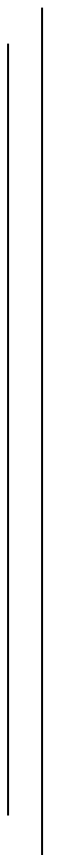


**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu **Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu**.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 5.350.000,- dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 65.000.000,00 . hal ini disebabkan karena Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoan sudah di limpahkan ke Propinsi, Sedang Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp 20.844.415.273,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 21.483.982.324,00 atau mencapai 97,18 %.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 11.976.633.593,52 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0,- dan Aset Tetap sebesar Rp. 11.960.090.514,52,- berupa tanah sebesar Rp. 1.084.196.500,49,- peralatan dan mesin sebesar Rp. 11.403.68.504,68,- gedung dan bangunan sebesar Rp. 9.756.564.850,49 jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 3.978.153.887,05,- Aset tetap Lainnya sebesar Rp. 50.833.500,00 dan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp.203.083.628,00 Nilai Kewajiban sebesar Rp. 0,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 11.976.633.593,52

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.5.350.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 21.113.707.485,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (21.108.357.458.00.-)

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERIKANAN

- 2.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perikanan
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Beban
 - 3.1.3 Belanja
 - 3.1.4 Aset

3.1.5 Kewajiban

3.1.6 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasi/entitas pelaporan yang menggunakan basis
akrual pada pemda

BAB IV Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan Pemda

BAB V P E N U T U P

B A B II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERIKANAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		BELANJA		
			ANGGARAN	REALISASI	PENCAPAIAN
			Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.591.892.228	5.312.888.912	95,01
I	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.484.315.226	4.242.330.653	94,60
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.272.249.338	4.040.694.546	94,58
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212.065.888	201.636.107,00	95,08
II	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.461.580	405.251.774	96,84
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.986.880	7.927.000,00	99,25
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	96.747.600	90.947.100,00	94,00
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.014.090	46.359.600,00	98,61
4	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.358.010	18.355.000,00	99,98
5	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	3.240.000,00	60,00
6	Sub Kegiatan	Facilitasi Kunjungan Tamu	3.080.000	2.765.400,00	89,79
7	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.875.000	235.657.674,00	98,24
III	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.833.072	221.697.585	98,61
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.252.732	77.126.985,00	96,11
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.580.340	144.570.600,00	99,99
IV	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.282.350	443.608.900	95,55
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	366.648.350	349.568.700,00	95,34
2	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.950.000	19.635.000,00	85,56
3	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.684.000	74.405.200,00	99,63
	PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	7.466.988.200	7.330.913.895	98,18
I	Kegiatan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.466.988.200	7.330.913.895	98,18
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.022.750.820	1.022.750.820	100,00
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	184.308.432	184.308.432	100,00
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	5.407.940.748	5.407.940.748	100,00
4	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	285.000.000	215.372.780,00	75,57
5	Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	566.988.200	500.541.115,00	88,28
	PROGRAM	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	187.189.750	182.479.200	97,48
I	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	77.189.750	72.637.800	94,10
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12.897.750	12.572.900	97,48
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	44.190.000	42.765.150	96,78
3	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	7.286.100	6.437.250	88,35
4	Sub Kegiatan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	12.815.900	10.862.500	84,76
III	Kegiatan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	110.000.000	109.841.400	99,86
1	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	110.000.000	109.841.400,00	99,86
	PROGRAM	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	241.053.440	240.276.875	99,68
I	Kegiatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	15.050.380	14.505.250	96,38
1	Sub Kegiatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	15.050.380	14.505.250,00	96,38
II	Kegiatan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	226.003.060	225.771.625	99,90
1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	210.951.920	210.897.125,00	99,97
2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.051.140	14.874.500,00	98,83

	PROGRAM	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	28.999.960	27.000.650	93,11
I	Kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	28.999.960	27.000.650	93,11
1	Sub Kegiatan	Registrasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan daerah Kab/Kota	28.999.960	27.000.650	93,11
	PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.057.742.728	4.997.393.180	98,81
I	Kegiatan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.057.742.728	4.997.393.180	98,81
1	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	5.012.167.728	4.959.722.780	98,95
3	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	45.575.000	37.670.400,00	82,66
	PROGRAM	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.734.957.860	1.713.535.401	98,77
I	Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.734.957.860	1.713.535.401	98,77
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.043.000	29.890.286	99,49
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.704.914.860	1.683.645.115	98,75
	PROGRAM	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.175.158.158	1.039.927.160	88,49
I	Kegiatan	Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	36.274.912	27.540.112	75,92
1	Sub Kegiatan	Penyediaan data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	36.274.912	27.540.112	75,92
II	Kegiatan	Pembinaan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	844.170.746	726.311.134	86,04
1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	844.170.746	726.311.134	86,04
III	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	294.712.500	286.075.914	97,07
1	Sub Kegiatan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	294.712.500	286.075.914,00	97,07
		TOTAL	21.483.982.324	20.844.415.273	97,02

2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal Pencapaian Target kinerja ini memiliki hambatan dan kendala-kendala, yang diuraikan per kegiatan dibawah ini :

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 8 Program, 15 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.483.982.324,- dan Realisasi sebesar Rp. 22.844.415.273 (97,02 %).

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi keuangan pada Dinas Perikanan dan Pangan . Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 4.484.315.226,- dengan realisasi anggaran Rp . 4.242.330.653,- . Pada kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 4.272.249.338,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.040.694.546,- (94,58 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sasaran sub kegiatan ini adalah tertib administrasi pelaksanaan tugas ASN selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 212.065.888,- dengan realisasi sebesar Rp. 201.636.107,- (95,08 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Perikanan dan Pangan .Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 418.461.580,- dengan realisasi anggaran Rp . 405.251.774,- . Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan, Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.986.880,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.927.000,- (99,25%) , hambatan dan kendala tidak ada.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor , yaitu 2 Unit Laptop, 2 (satu) unit Printer, 3 Unit PC dan 6 Unit AC dengan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.96.747.600,- dengan realisasi sebesar Rp.90.947.100,-(94,00 %) hambatan dan kendala tidak ada.

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Alat Tulis Kantor dan Logistik lainnya selama 12 bulan Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 47.014.090,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.359.600,- atau 98,61 % , hambatan dan kendala tidak ada.

4. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan, Pagu Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.358.010,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.355.000,- (99,98 %) , hambatan dan kendala tidak ada.
5. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**
Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.240.000,- (60.00 %) , hambatan dan kendala tidak ada.
6. **Fasilitas Kunjungan Tamu**
Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Makanan dan Minuman untuk tamu dari pusat maupun dari Propinsi selama 12 bulan, Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.765.400,- (89,79 %) , hambatan dan kendala tidak ada.
7. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Sasaran sub kegiatan ini adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan, Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 239.875.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 235.657.674,- (98,24 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

III. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah seperti Listrik, Air dan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 224.833.072,- dengan realisasi anggaran Rp . 221.697.585,- . Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan Yaitu :

1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik**
Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 80.252.732,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.126.985,- (96,11 %) , hambatan dan kendala tidak ada.
2. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 144.580.340,- dengan realisasi sebesar Rp. 144.570.600,- (99,99 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan dari Kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perikanan dan Pangan selama 12 bulan sehingga memiliki umur ekonomis diatas rata-rata. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 464.282.350,- dengan realisasi anggaran Rp. 443.608.900,- Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan dan Pangan , Pagu anggaran Sub Kegiatan ini Rp. 366.648.350,- dengan realisasi anggaran Rp. 349.568.700,- atau (95,34 %.) hambatan dan kendala tidak ada.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan, Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 22.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.635.000,- atau 85,56 %. hambatan dan kendala tidak ada.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan agar menambah nilai aset bangunan dan terpeliharanya gedung kantor Dinas Perikanan yaitu berupa rehab Kantor , Pagu anggaran sub Kegiatan ini Rp. 74.684.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 74.405.200,- atau 99,63 %, hambatan dan kendala tidak ada.

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan informasi pengelolaan potensi perikanan tangkap yang ada di Pesisir Selatan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas usaha perikanan tangkap serta kesejahteraan nelayan. Untuk mencapai tujuan program tersebut, program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.5.057.742.726,- dengan realisasi Rp. 4.997.393.180 dan didukung 1 (satu) kegiatan berikut ini:

I. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil Perikanan ini juga penentu dalam peningkatan Produksi Perikanan sebab tanpa didukung oleh sarana prasarna

yang cukup maka dapat mempengaruhi Produksi Perikanan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.5.057.742.726,- dengan realisasi Rp. 4.997.393.180 dan didukung 2 (dua) Sub kegiatan berikut ini:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

Sub Kegiatan ini bertujuan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang bersumber dari Dana DAK dan APBD/APBD Pagu anggaran sub Kegiatan ini Rp. 5.012.167.728,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.959.722.780,- atau 98,95 %, rincian pelaksanaan :

a. Sumber Dana DAK

- Pengadaan Perahu Jukung 14 Paket
- Pengadaan Mesin 15 PK 10 Unit
- Pengadaan Alat Penangkap Ikan 65 Unit

b. Sumber Dana APBD

- Pengadaan Mesin Tempel 15 PK 56 Unit
- Pengadaan Mesin Tempel 40 PK 20 Unit
- Pengadaan Mesin Long Tail 25 Uit
- Pengadaan Alat Tangkap Jaring (Gillnet Monofilamen) 250 Piece
- Pengadaan Alat Tangkap Jaring Trammel Net) 14 Unit

c. Sumber Dana APBDP

- Pengadaan Mesin Tempel 15 PK 22 Unit
- Pengadaan Mesin Tempel 40 PK 3 Unit
- Pengadaan Peralatan Kapal 1 Paket
- Pengadaan Komputer (PC) 1 Unit
- Pengadaan Printer 2 Unit
- Pengadaan Kendaraan Roda Dua 1 Unit

2. Pelaksanaan Fasilitas Bantuanan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk kelompok KUB dalam pendanaan (modal) dan kemitraan usaha Pagu Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp. 45.575.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.670.400,- atau 82,66 %. Hambatan dan kendala tidak ada.

C. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya baik diperairan umum atau kolam, Pagu anggaran program ini bersumber dari Dana DAK dan APBD yakni sebesar Rp. 1.734.957.860,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.713.535.401.- yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan Budidaya , yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan .

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai data pembudidayaan ikan sehingga data yang diperoleh lebih valid dan akurat, Pagu Anggaran sub kegiatan ini setelah refocusing sebesar Rp. 30.043.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.890.286,- atau 99,49 %. Hambatan dan kendala Tidak Ada

2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , yang bertujuan Meningkatkan Produksi Perikanan, Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Pembudidaya , Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 1.704.914.860,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.683.645.115,- atau 98.75 %, Pelaksanaan kegiatan ini dengan rincian

a. Sumber Dana DAK

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPR Ikan Lele dan Ikan Hias : 2 Paket
- Percontohan Budidaya Ikan Lele, Nila dan Gurame : 7 Paket
- Pengadaan Calon Induk dan Prasarana Pembenihan Ikan : 2 paket
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahan Baku Pakan Ikan : 2 Paket

b. Sumber dana APBD

- Pengadaan bantuan Bibit Ikan Lele : 1 paket
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan : 1 Paket

hambatan dan kendala yaitu kurangnya lahan pada BBI Pincuran Boga untuk melakukan kegiatan pembenihan dan pendederan.

D. Program Pengelolaan Sumber Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp. 7.466.988.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.330.913.895,- atau 98.18 %, yang bersumber dari Dana DAK dan APBD . Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan

I. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan Ketersediaan Pangan, sehingga cukup memenuhi kebutuhan pangan. Yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan.

A. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

Sub kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bertujuan Mengantisipasi Kekurangan Bahan Pangan di saat musim paceklik dan gagal panen, Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.022.750.820,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.022.750.820,- (100 %), pelaksanaan berupa Pembangunan Lumbung Pangan sebanyak 7 Unit.

B. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

Sub kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bertujuan Mempercepat dalam proses pasca panen, pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 184.308.432,- dengan realisasi sebesar Rp. 184.308.432,- (100 %), pelaksanaan berupa Pembangunan Lantai Jemur sebanyak 7 Unit.

C. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

Sub Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , yang bertujuan untuk terwujudnya Kemandirian Pangan di Kelompok, Pagu Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 5.407.940.748,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.407.940.748,- atau 100 %, pelaksanaan berupa :

- Pengadaan Mesin RMU sebanyak 7 Unit
- Pengadaan Be Drayer sebanyak 7 Unit
- Pembangunan Rumah RMU dan Bed Drayer sebanyak 7 Unit

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.285.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 215.372.780,- atau 75,57 %, sub kegiatan merupakan pendukung dari kegiatan DAK berupa pembinaan, monev ke kelompok penerima bantuan DAK.

5. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 566.988.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 500.541.115,- atau 88,28 %, Hambatan dan Kendala tidak ada.

Pada Sub kegiatan ini kegiatan berupa Pembelian Gabah untuk pengembangan usaha gapoktan penerima manfaat LPM sebanyak 42 Ton (7 gapoktan)

E. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan, sehingga cukup memenuhi kebutuhan pangan. Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 187.199.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 182.479.200,- atau 97,48 % . Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan

- I. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan,

1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.897.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.572.900,- atau 97,48 %, Hambatan dan Kendala tidak ada.

2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 44.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp.42.765.900,- atau 96,78 %, Hambatan dan Kendala tidak ada.

3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.286.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.437.250,- atau 88,35 %, Hambatan dan Kendala tidak ada.

4. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.815.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.862.500,- atau 84,76 %, Hambatan dan Kendala tidak ada.

- II. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 110.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 109.841.400,- atau 99,86 %, Pelaksanaan pada Sub kegiatan ini berupa pemberian bantuan hibah uang kepada kelompok Wanita Tani (KWT) yakni : KWT Mekar Sari sebesar Rp. 15.000.000,- , KWT Kayu Gadang Saiyo sebesar Rp. 15.000.000,- KWT Bina Karya sebesar Rp. 15.000.000,- Hambatan dan Kendala tidak ada.

F. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini bertujuan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat miskin yg terkena rawan pangan transien sehingga menjamin pasokan pangan yang stabil.

Pagu Anggaran untuk program ini tahun 2022 sebesar Rp. 241.053.440,- dengan Realisasi sebesar Rp.240.278.875,- . Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

- I. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Kecamatan , kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan
 1. Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.050.380,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 14.505.250,- atau 96,38 %, Hambatan dan Kendala Tidak Ada.
- II. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota , terdiri dari 2 Sub Kegiatan
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran Pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.210.951.920 ,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 210.897.125,- atau 99,97 %. Pada Sub Kegiatan ini pelaksanan kegiatan penyediaan Bahan Baku Persediaan Penanganan Balita Gizi Buruk dan Stunting berupa bantuan paket sembako (Induk Ayam, beras,minyak goreng,telur, gula pasirdan kacang hijau) kepada 28 Balita pada Kec. Bayang, IV Nagari Bayang Utara, Batang Kapas, Sutera, Ranah Ampek Hulu Tapan dan Silaut.
 2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup 1(satu) aerah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.051.140,- dengan Realisasi sebesar Rp. 14.874.500,- atau 98.83 %

G. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini bertujuan Memberikan Jaminan dan Perlindungan Bagi Masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi produsen,

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 28.999.960,- dengan Realisasi sebesar Rp. 27.000.650,-, Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

I. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

1. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota

Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 28.999.960,- dengan Realisasi sebesar Rp. 27.000.065,- atau 93,11 %. Hambatan dan Kendala tidak ada.

J. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini bertujuan untuk peningkatan produk perikanan yang berdaya saing dengan cara meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan meningkatnya nilai konsumsi ikan. Pagu anggaran program ini Rp. 1.175.158.158,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.030.927.160,-. Program ini didukung dengan 3 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

I. Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.

1. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran hasil

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai data Pengolahan hasil perikanan sehingga data yang diperoleh lebih valid dan akurat, Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 36.274.912,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.540.112,- atau 75,92 %. Hambatan dan kendala tidak ada

II. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

1. Pelaksanaan bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan variasi produk olahan ikan serta menjamin keamanan produk hasil perikanan, Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 844.170.746,- dengan Realisasi 726.311.134,- atau 86,04 %, dengan rincian kegiatan :

- Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan beserta Perlatan pendukung (dana DAK) sebanyak 3 Unit
- Pengadaan Cool Box untuk pemasaran Hasil (Dana APBDP) sebanyak 45 Unit

III. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(satu) Kabupaten/Kota

1. Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk gemar makan ikan yang dimulai dari masa ibu hamil (Bayi dalam Kandungan). Mengingat ikan memiliki komposisi nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan, kecerdasan dan pertumbuhan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya, pengolahah dan pemasaran hasil perikanan melalui peningkatan rata-rata konsumsi ikan.

Pagu Anggaran setelah refocusing sebesar Rp. 294.712.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 286.075.914 ,- atau 97,07 %, kegiatan pada Sub kegiatan ini berupa Lomba Masak Serba ikan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat dan Forikan.

BAB. III.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERIKANAN

3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos –Pos Pelaporan Keuangan Pemda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan yang dibuat adalah berbasis akrual . Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, & relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, & politik.

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 terdiri dari:

3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

3.1.2. Beban

Beban merupakan suatu **penurunan** nilai ekonomi yang berupa kas keluar atau aktiva berkurang. Biasanya beban dianggap sebagai **kewajiban** yang dapat menyebabkan nilai ekuitas menurun. Umumnya beban dianggap sebagai pengorbanan atau kewajiban yang sebelumnya telah terjadi.

Beban adalah suatu yang dikeluarkan atau dikorbankan dengan **tujuan** untuk dapat memperoleh pendapatan, misalnya akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi seperti beban listrik, beban penyusutan, beban sewa, beban gaji, dan lain-lain.

Beban dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Beban Perolehan Pendapatan
- b. Beban Operasi/rutin
- c. Beban operasional lainnya
- d. Beban lainnya

3.1.3. Belanja

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. Belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja

3.1.4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Dinas Perikanan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

3.1.5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Perikanan Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ekuitas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Ekuitas Dana Lancar
- b. Ekuitas Dana Investasi
- c. Ekuitas Dana Cadangan

3.2 . Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda

BELANJA

Belanja meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan Total Pagu Anggaran **Rp. 21.483.982.324,-** dan realisasi Belanja Daerah sampai dengan Desember 2022 adalah sebagai berikut ;

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
1.	Belanja Operasi	11.183.945.996.00	20.726.138.458.00
	Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah Sampai dengan Desember 2022 realisasi Belanja Operasi mencapai Rp. 20.726.138.458,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai		
	- Gaji dan Tunjangan	3.435.689.080,00	2.693.246.771,00
	- Tambahan Penghasilan PNS	1.808.744.673,00	1.347.445.775,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	282.225.000.00	232.435.000.00
	- Insentif Pemungutan Ret Daerah	00	00
	Jumlah Belanja Pegawai	5.526.658.753,00	4.273.129.546,00
	Belanja Barang dan Jasa		
	- Belanja Bahan Pakai Habis	619.732.800	1.262.274.811,00
	- Belanja Bahan/Material	00	00
	- Belanja Jasa Kantor	477.727.817,00	541.339.385,00
	- Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang /Parkir	4.000.000,00	00
	- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	00	13.421.107,00
	- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	00	3.500.000,00
	- Belanja Sewa Aset Tetap lainnya	00	1.500.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	49.000.000,00	233.231.350,00
	- Belanja Pemeliharaan	376.577.999,00	142.186.200,00
	- Belanja Perjalanan Dinas	428.422.927,00	1.048.490.961,00
	- Belanja Hibah Barang/Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga	2.938.902.650,00	3.729.000.000,00
	- Belanja Honorarium Non Pegawai	,00	,00
	- Honorarium PNS	,00	,00
	- Honorarium Non PNS	,00	,00
	- Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	549.760.000,00	,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	2.505.271.543,00	6.974.943.814,00
	Belanja Hibah		

- Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum	2.886.046.700,00	9.478.066.098,00
Jumlah Belanja Hibah	2.886.046.700,00	9.478.066.098,00

II Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Alat dan Mesin	173.618.000,00	152.272.950,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	92.351.000,00	,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	,00	,00
Jumlah Modal	265.969.000,00	152.272.950,00

ASET

Aset Lancar

No.	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	00.-	,00

Saldo kas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp.00,-

Untuk Tahun 2022 Saldo Kas Dinas Perikanan dan Pangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 00,-

Aset Tetap

No.	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
1.	Aset Tetap	10.647.969.087,16	11.960.090.514,52

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 11.960.090.514,52**, terjadi mutasi tambah sebesar **Rp.152.272.950,00** dan Mutasi Kurang sebesar **Rp. 00**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	1.084.196.500,49	1.084.196.500,49
Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.084.196.500,49 terjadi mutasi Kurang sebesar Rp. ,00 dan Mutasi tambah sebesar Rp. ,00.		

2. Peralatan Dan Mesin	11.251.407.554,68	11.403.680.604,68
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

Dalam tahun 2022 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 152.272.950,00 dan mutasi kurang sebesar Rp. 00,-

3. Gedung dan bangunan 9.756.564.850,49 9.756.564.850,49

Dalam tahun 2022 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. ,00 dan mutasi kurang sebesar Rp. 00,-

4. Jalan Irigasi dan Jaringan 3.978.153.887,05 3.978.153.887,05

Dalam tahun 2022 terdapat mutasi tambah sebesar Rp., 00 dan mutasi kurang sebesar Rp. 00,-

5. Aset Tetap Lainnya 50.833.500,00 50.833.500,00

Dalam tahun 2022 tidak terjadi mutasi tambah maupun kurang

6. Kontruksi Dalam 203.083.628,00 203.083.628,00
Pengerjaan

6. Akumulasi Penyusutan (14.516.422.356,19) (14.516.422.356,19)

2. Aset Lainnya 16.543.079,00 16.543.079,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2022 sebesar **Rp. 16.543.079,00** tidak terjadi mutasi.

c Kewajiban 0 0

Komposisi dan nilai saldo Kewajiban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2022 sebesar **Rp. 0,-** terjadi mutasi kurang sebesar Rp. 150.937.225,00

d Ekuitas 12.447.312.248,52 11.976.633.593,32

Komposisi dan nilai saldo Ekuitas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2022 sebesar **Rp. 11.976.633.593,52,-** terjadi Mutasi Tambah sebesar Rp. 152.272.950,00 dan mutasi kurang sebesar Rp. 622.951.605,00

BAB VI

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan bagi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan , 05 Januari 2023

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

